

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022
(LKj-IP SKPD)



DISUSUN OLEH:
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT kami panjatkan, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya semua tugas dan tanggung jawab kami di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah telah terlaksana dengan baik, termasuk dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) SKPD tahun 2022.

LKj-IP ini merupakan media pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pelaksanaan program dan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2022. Dalam laporan ini dipaparkan capaian kinerja seluruh program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Berbagai keberhasilan tentu harus dipertahankan bila perlu ditingkatkan, sebaliknya berbagai kekurangan yang ada untuk disempurnakan di masa yang akan datang. Pada akhirnya diharapkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terus meningkat dari waktu ke waktu.

Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Praya, 30 Januari 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

BAIQ ALUH WINDAYU W. SE. MM

NIP. 197307291997032008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1 Tugas dan Fungsi.....	1
I.2 Data Kepegawaian BPKAD	2
I.3 Struktur Organisasi.....	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
II.1 Rencana Strategis	8
II.2 Rencana Kinerja Tahunan	12
II.3 Indikator Kinerja Utama	14
II.4 Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2022	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
III.1 Skala Pengukuran Evaluasi	19
III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran BPKAD Tahun 2022	20
III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis Tahun 2022 ..	55
III.4 Akuntabilitas Keuangan	56
III.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya	61
BAB IV. PENUTUP	63
LAMPIRAN	
1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA;	
2. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN 2022	
3. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN;	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 ini disusun dengan berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan program kegiatan serta tingkat kinerja yang telah dicapai dalam tahun 2022 sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahun 2022, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 – 2026 dan Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026.

Secara garis besar Laporan Kinerja Tahunan ini menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan indikator kinerja yang diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*) dan hasil (*outcome*) dari kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2022.

Pengukuran terhadap kinerja sebanyak 40 sub kegiatan Sesuai DPA Tahun 2022 sebagai tahapan dalam upaya pencapaian sasaran yang tertuang dalam Renstra. Adapun penjabaran indicator kinerja pada renstra adalah Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 86,01 % dan prosentase penanganan permasalahan aset daerah sebesar 102,05% % maka secara kuantitatif kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah yaitu rata-rata capaian kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 adalah sebesar 94,03% dan capaian kinerja keuangan adalah sebesar 92,21% termasuk kategori baik jika diukur secara kualitatif.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah sangat strategis yaitu sebagai *stakeholders* dalam dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah No. 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan

- dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.2. Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah keadaan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebanyak 63 orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

DATA PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PER 31 DESEMBER 2021

NO	N A M A	L/P	GOL.	ESELON	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM	KET.
1	BAIQ ALUH WINDAYU W, SE.MM.	P	IV/c	II	Kepala Badan	S.2	PIM II	
2	KUSNA HARIADI, SE. MM	L	IV/b	III	Sekretaris Badan	S.2	PIM III	
3	IDA AYU W. MARET,S.Sos.MPH.	P	IV/a	-	Fungsional Perencana Ahli Madya	S.2	PIM IIV	
4	ENDANG TRIWINDUSARI, SE. MM	P	IV/a	III	Kepala Bidang Pembinaan, Aset	S.2	PIM IV	
5	DAVINA FATANA, SE. M.Acc	P	IV/a	III	Kepala Bidang Perbendaharaan	S.2	PIM. III	
6	BAIQ TISNIWATI, SE, ME	P	IV/a	III	Kepala Bidang Akuntansi dan	S.2	PIM. IV	



NO	N A M A	L/P	GOL.	ESELON	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM	KET.
					Pelaporan			
7	KORI ATMAJA, SE. MM	L	III/d	III	Kepala Bidang Anggaran	S.2	PIM. IV	
8	ROSMALIA HAYATI, SE. M.Ak	P	IV/a	IV	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Finansial	S.2	PIM. IV	
9	JANUR WIDODO, SE. M.Ak.	L	IV/a	-	Fungsional Perencana Ahli Madya	S.2	PIM. IV	
10	CHANDRA RUKMI SARASWATI, SE. M.Ak	P	IV/a	IV	Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II	S.2	-	
11	LALU KHAERUL HIDAYAT, S.Sos.	L	III/d	IV	Kepala Sub Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan	S.1	PIM. IV	
12	DEDI HAMDANI, S.STP	L	III/d	-	Fungsional AKPD	S.1	PIM. IV	
13	LALU SABIDI, S.Sos	L	III/d	-	Fungsional AKPD	S.1	-	
14	BAIQ SOLATIAH, S.Sos	P	III/d	-	Fungsional AKPD	S.1	PIM. IV	
15	KARDIMAN, S.Sos	L	III/d	IV	Kasubbid Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	S.1	-	
16	MIPZAN WADI, S.IP	L	III/d	IV	Kasubbid Pemanfaatan dan Penatausahaan Aset	S.1	-	
17	ERA WIGATI, SE	P	III/d	IV	Kasubbid Akuntansi dan pelaporan pelaksanaan anggaran	S.1	-	
18	LALE ZOHRATUL AINI, ST.	P	III/d	-	Fungsional AKPD	S.1	-	
19	KADEK JANOARSEDI, ST.	L	III/d	-	Fungsional AKPD	S.1	-	
20	BAIQ MIRA LUTHFIANI, SE. M.Ak	P	III/d	IV	Kasubbid Perbendaharaan I	S.2	-	
21	NURHASANAH, SE	P	III/b	IV	Kasubbid anggaran I	S.1	-	
22	RETIMIN, S.Sos	L	III/d	-	Pengolah Daftar Gaji	S.1	-	
23	ZURRIATI, S.IPd	P	III/d	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	



NO	N A M A	L/P	GOL.	ESELON	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM	KET.
24	RAMDAN, S.IP.	L	III/d	-	Pengelola Pemanfaatan BMD	S.1	-	
25	SOPIYATUN, S.IP	P	III/d	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
26	HARIYADI, SE	L	III/d	-	Pengelola Pemanfaatan BMD	S.1	-	
27	RITA ZAHARA, S.Sos	P	III/d	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
28	BAIQ WINARNI, S.Sos.	P	III/c	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
29	NURDIAN IRAWANTI	P	III/c	-	Fungsional Perencana Muda	S.1	-	
30	SAMSUL HADI, S.IP. M.Ak	L	III/c	-	Penata Laporan Keuangan	S.2	-	
31	ERMA APRILIANTI, A.Md	P	III/c	-	Penata Laporan Keuangan	D.3	-	
32	MUNIRAH	P	III/b	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
33	BAIQ SRI HANDAYANI	P	III/b	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
34	NINING ROHAINI PN	P	III/b	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
35	BAIQ DESI ERMILANI, S.IP	P	III/b	-	Penyusun Barang Inventaris	S.1	-	
36	NI MADE DWI KARYATNI, SE. M.Ak	P	III/b	-	Penata Laporan Keuangan	S.2	-	
37	RIA PRIHANTINI, A.Md	P	III/b	-	Verifikator Anggaran	D.3	-	
38	BAIQ SRI HAYATI	P	III/b	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
39	AHMAD RAIYAN, S.STP	L	III/b	-	Analisis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S.1	-	
40	MOH. SAHIR, S.STP	L	III/b	-	Analisis perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	S.1	-	
41	LALU ARYA FARHAN, A.Md	L	III/a	-	Penata Keuangan	D.3	-	



NO	N A M A	L/P	GOL.	ESELON	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM	KET.
42	SUDARTINI, A.Md	P	III/a	-	Penata Laporan Keuangan	D.3	-	
43	HIDAYAH, S.Sos	P	III/a	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
44	MARDIAH, S.IP	P	III/a	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
45	AHMAD SYA'RONI, S.Adm	L	III/a	-	Kustodian Kekayaan Negara	S.1	-	
46	DESNIANI DEWI KARTIKA, S.IP	P	III/a	-	Verifikator Keuangan	S.1	-	
47	NURHANAH	P	III/a	-	Bendahara Pengeluaran	SLTA	-	
48	AMHARI	L	III/a	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
49	PRASETYO TRI LAKSONO	L	III/a	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
50	ARIFIN	L	III/a	-	Pengemudi	SLTA	-	
51	RINJA ADITYA, SE	L	III/a	-	Analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan	S.1	-	
52	AHMAD FATONI	L	II/d	-	Pengelola Sarana dan Prasarana	SLTA	-	
53	SUYATMI	P	II/d	-	Pengelola Laporan Keuangan	SLTA	-	
54	BAIQ SRI HASDINIARNI	P	II/d	-	Pengelola Laporan Keuangan	SLTA	-	
55	DEWI SRI SUSANTI	P	II/c	-	Pengelola data kebijakan klasifikasi barang	SLTA	-	
56	LALU MUHAMAD ZAKARIA	L	II/c	-	Pengelola Sarana dan Prasarana	SLTA	-	
57	H. AHMAD MASRI	L	II/c	-	Verifikator Keuangan	SLTA	-	
58	RONI ZULMARTOHI, A.Md	L	II/c	-	Pengelola Sistem dan Jaringan	D3	-	
59	HERU ARISTYAWAN, A.Md	L	II/c	-	Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	D3	-	
60	ENDANG WIIJI HASTUTI	P	II/b	-	Pengelola Perbendaharaan dan pelayanan	SLTA	-	



NO	N A M A	L/P	GOL.	ESELON	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIKLAT PIM	KET.
61	RAMLI	L	I/d	-	Pramu Kebersihan	SLTP	-	
62	RAHMANDA PRISKA ADENIA, SH	P	III/a	-	Analisis Hukum	S1	-	CPNS

Keadaan : 31 Desember 2022

Dari tabel diatas dapat diuraikan jumlah eselon II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 1 orang, eselon 3 berjumlah 5 orang, eselon 4 berjumlah 9 orang, Fungsional Perencana Ahli Madya 2 orang, Fungsional AKPD 5 orang dan Fungsional Perencana Ahli muda 1 orang.

Dari data pendidikan dapat diuraikan 13 orang dengan pendidikan S2, 27 orang pendidikan S1, 6 orang pendidikan D III, 15 orang pendidikan SLTA dan 1 orang pendidikan SLTP.

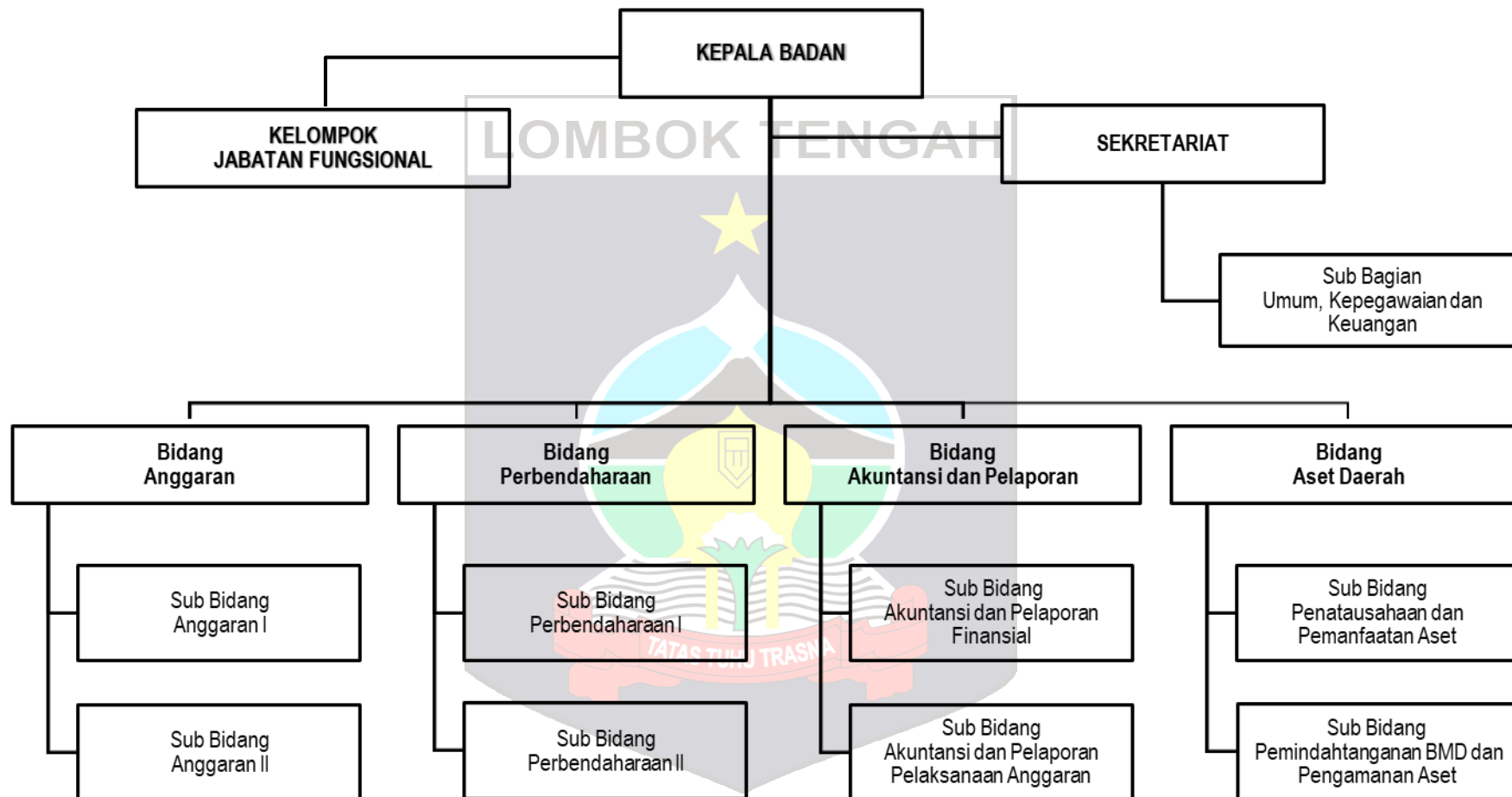
Berdasarkan data pangkat pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah, terdapat 10 orang pegawai dengan golongan IV, 42 orang golongan III, 9 orang golongan II dan 1 orang golongan I.

I.3. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 88 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dijelaskan struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPKAD KAB. LOMBOK TENGAH





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1.RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 adalah: **“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”**

Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang berkeimbangan dan berkelanjutan didukung infrastruktur berkualitas;
5. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya luhur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2021-2026, terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu “Pelayanan umum pemerintahan yang mudah, cepat dan bersih”.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH TAHUN 2021 S.D. 2026

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Regulasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Koordinasi, Rasionalisasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Prosentase penyelesaian masalah aset	Regulasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Koordinasi, Rasionalisasi	Program Pengelolaan Aset Daerah	

II.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

1) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan tujuan **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”**

2). Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
		Prosentase penanganan permasalahan aset daerah

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan-pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Aset Daerah

- Strategi : Regulasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Koordinasi, Rasionalisasi.
- Kebijakan : Pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah yang beriman, Sejahtera, Bermutu dan berbudaya			
Misi 3 : <i>Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Regulasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Koordinasi, Rasionalisasi	Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel



	Meningkatnya pengelolaan daerah	kinerja keuangan	Regulasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Rasionalisasi	Intensifikasi, Koordinasi,	Pengembangan sistem pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel
--	---------------------------------	------------------	--	----------------------------	---

II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah diarahkan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan. Sebagaimana perencanaan pembangunan lainnya, perencanaan koordinasi pemerintahan dan pembangunan secara tematik, holistik, integratif dan spasial dengan dengan pendekatan perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top-down dan bottom-up .

RENCANA KINERJA TAHUNAN BPKAD TAHUN 2022

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)		(3)
Meningkatnya Pengelolaan	Kinerja Keuangan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,00
Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah	Kinerja	Prosentase penanganan permasalahan aset daerah	77,65

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten *Lombok Tengah* melaksanakan program kegiatan, sebagai berikut:



No.	Program/kegiatan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU
	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	DAU
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	DAU DAU DAU DAU DAU
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	DAU

Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.



II. 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DN ASET DAERAH TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DN ASET DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab	Kondisi Saat Ini	Target Kinerja Tahun ke-					Kondisi Akhir
								1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil Audit BPK	BPK	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah total capaian nilai Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah : 1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2. Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam	Kementerian Dalam Negeri	BPKAD		70,00	71,56	73,14	74,76	76,40	76,40



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab	Kondisi Saat Ini	Target Kinerja Tahun ke-					Kondisi Akhir
				APBD 3. Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Dimensi Penyerapan Anggaran 5. Dimensi Kondisi Keuangan Daerah 6. Dimensi Opini BPK RI									
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase penanganan permasalahan aset daerah	Pemetaan data aset : 1. Tanah Pemda yang belum bersertifikat 2. Tanah Pemda yang bernilai 0 3. Tanah Pemda yang bermasalah 4. Peralatan dan mesin yg belum diketahui keberadaannya	Bidang Aset	BPKAD	74,12	77,65	79,21	80,79	82,41	84,05	84,05

II.4. PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BAIQ ALUH WINDAYU W., SE, MM

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI

Jabatan : Bupati Lombok Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 1 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. LALU PATHUL BAHRI

BAIQ. ALUH WINDAYU W., SE. MM
NIP. 197307291997032008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

No	Sasaranstrategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,00%
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah	77,65%

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 35.600.524.035,-	APBD
2.PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 396.329.467.735,-	
3.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 702.529.805,-	

Praya, 1 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. LALU PATHUL BAHRI

BAIQ. ALUH WINDAYU W,SE.MM
NIP. 197307291997032008

RENCANA SASARAN KINERJA PEGAWAI

OPD : BPKAD

PERIODE PENILAIAN : JANUARI S.D DESEMBER
TAHUN 2022

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	BAIQ ALUH WINDAYU W. SE. MM.		NAMA	H.L. PATHUL BAHRI, S.IP
NIP	197307291997032008		NIP	-
PANGKAT/GOL RUANG	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)		PANGKAT/GOL RUANG	-
JABATAN	KEPALA BADAN		JABATAN	BUPATI LOMBOK TENGAH
INSTANSI	BPKAD		INSTANSI	-
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	
1	2	3	4	
A. KINERJA UTAMA				
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,00	
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan Aset Daerah	Prosentase Penanganan permasalahan aset daerah	77,65	
B. KINERJA TAMBAHAN				



 Praya, 2 Januari 2022
 BUPATI LOMBOK TENGAH, Kepala BPKAD Kab. Lombok Tengah,

H. LALU PATHUL BAHRI, SIP

BAIQ ALUH WINDAYU W. SE.MM.
NIP. 197307291997032008

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Skala Ordinal

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Nilai >100	BAIK SEKALI
2	Nilai 86 s/d 100	BAIK
3	Nilai 71 s/d < 85	SEDANG
4	Nilai 56 s/d < 70	KURANG
5	Nilai < 55	SANGAT KURANG

III.2 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Tengah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran OPD. Tolak ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Kepala OPD.

Adapun Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target Akhir Renstra	Sumber Data
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase	70,00	60,21	86,01	-	76,40	Kemendagri
2	Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah	Prosentase	77,65	79,24	102,05	74,12	84,05	BPKAD
	Rata-rata	Prosentase			94,03	Rata-rata nilai : Baik		

Adapun analisa capaian masing masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan

berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi: 1. kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2. pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; 3. transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4. penyerapan anggaran, 5. kondisi keuangan daerah; dan 6. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

- 1) Dimensi Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran mencakup indikator:
 - a) kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD;
 - b) kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS;
 - c) kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD;
 - d) kesesuaian pagu program: RKPD dan KUA-PPAS; dan
 - e) kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.
- 2) Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD mencakup:
 - a) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) diluar gaji;
 - c) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer; dan
 - d) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator:
 - a) ketepatan waktu; dan
 - b) keteraksesan.
- 4) Dimensi Penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan:
 - a) anggaran belanja operasional;
 - b) anggaran belanja modal;
 - c) anggaran belanja tidak terduga; dan
 - d) anggaran belanja transfer.
- 5) Dimensi Kondisi keuangan daerah mencakup indikator:

- a) kemandirian keuangan;
 - b) fleksibilitas keuangan;
 - c) solvabilitas operasional;
 - d) solvabilitas jangka pendek;
 - e) solvabilitas jangka panjang; dan
 - f) solvabilitas layanan.
- 6) Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dilakukan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut.

Capaian indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 1 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi th sebelumnya	Target akhir renstra 2026	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Point	70,00	60,21	86,01	-	76,40	Kemendagri
	RATA-RATA				86,01			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan daerah sebesar 86,01% dengan kriteria baik. Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Lombok Tengah, sebagai berikut :

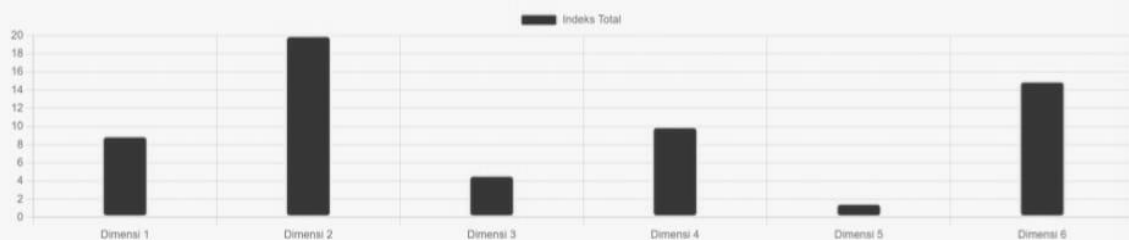
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

60.2141

Perlu Perbaikan

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah - IPKD

IPKD didapat dengan menjumlahkan seluruh indeks pada setiap dimensi $8,9825 + 20 + 4,6552 + 10 + 1,5765 + 15$. Dari 6 dimensi tersebut maka Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang didapat adalah **60.2141** dan dengan standar deviasi saat ini yaitu **10.7087** dan rata rata **64.1632**



4/12

Keterangan Pemingkatan Berdasarkan Hasil Pengukuran IPKD :

- Kategori baik jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih besar dari $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$;
- Kategori perlu perbaikan jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih kecil dari $MEAN + (1 \times \text{standar deviasi})$;
- Kategori sangat perlu perbaikan jika nilai indeks total seluruh dimensi lebih kecil dari $MEAN - (1 \times \text{standar deviasi})$.

IPKD didapat dengan menjumlahkan seluruh indeks pada setiap dimensi, meliputi :

- kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran memperoleh nilai 8,98 poin;
- pengalokasian anggaran belanja dalam APBD memperoleh nilai 20 poin;
- transparansi pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai 4,65 poin;
- penyerapan anggaran memperoleh nilai 10 poin,
- kondisi keuangan daerah memperoleh nilai 1,58 poin; dan
- opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD memperoleh nilai 15 poin.

Sehingga total Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 60,21 poin atau kategori perlu perbaikan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator Indeks Pengelolaan Keuangan daerah Tahun 2022 adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koodinasi dan Penyusunan KUA-PPAS
2. Koodinasi dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS
3. Koodinasi dan Penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
4. Koodinasi dan Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5. Koodinasi dan Penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
6. Koodinasi dan Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD
8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD
9. Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
10. Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan
11. Koordinasi perencanaan anggaran Belanja

b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2. Penyiapan, pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
3. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
4. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya
5. Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah
6. Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan

pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2. Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran
3. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Koordinasi dan penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5. Penyusunan Tanggapan/Tindaklanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
4. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah

1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah

Capaian kinerja masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.145.741.368,- :

Output : Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah

Outcomes : Perencanaan Anggaran Daerah disusun tepat waktu

Realisasi : - Keuangan sebesar Rp 1.079.552.889,- (91,89%)
- Fisik 100%

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah dilaksanakan guna memastikan dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan indikator ketepatan waktu.

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen);

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dinyatakan bahwa jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan mencapai sebesar 36,01% dari total rencana belanja daerah dinilai telah memenuhi alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen) diluar gaji;

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dinyatakan bahwa jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar 24,23% dari total belanja daerah di luar gaji ASN dinilai telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan dana transfer; dan

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Nusa Tenggara Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dinyatakan bahwa jumlah alokasi anggaran infrastruktur sebesar 25,73%.

- d) penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penghitungan semua kebutuhan terhadap ketersediaan barang/jasa dan sarana prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM dan hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Proses penyusunan APBD yang dimulai dari tahapan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan penetapan APBD, dengan capaian kesesuaian jadwal sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tahapan dan Capaian Kesesuaian Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan Kesesuaian Jadwal
	Nomor	Tanggal	
Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS oleh Pemerintah kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah	045.2/330/BPAKD	13 Juli 2022	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan juli)
Kesepakatan KUA Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah	904/305.a/BPKAD	15 Agustus 2022	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan PPAS Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah	904/395.b/BPKAD 903/150.d/DPRD	15 Agustus 2022	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Lombok Tengah	045.2/554/BPKAD	24 Oktober 2022	Belum Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	905/609/BPKAD 903/233/DPRD	28 November 2022	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD untuk	910/615/BPKAD	1 Desember 2022	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah

dievaluasi			APBD)
Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang APBD dan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD	Perda Nomor 21 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 34 Tahun 2022	28 Desember 2022	Sesuai, (paling lambat 31 Desember)

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.268.363.452,- adapun indikator sebagai berikut :

Output : Dokumen perbendaharaan

Outcomes : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan APBD
100%

Realisasi : - Keuangan sebesar Rp 1.243.852.154,- (98,07%)
- Fisik 100%

Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dilaksanakan guna memastikan dimensi penyerapan anggaran mencakup indikator yang disesuaikan dengan struktur anggaran belanja dalam APBD meliputi penyerapan anggaran belanja operasional, anggaran belanja modal, anggaran belanja tidak terduga; dan anggaran belanja transfer.

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 (*unaudited*), penyerapan anggaran seluruh OPD pada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dapat disajikan sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA OPERASI	1.714.911.166.123,00	1.432.720.888.883,06	83,54
BELANJA MODAL	410.498.253.009,00	374.487.665.835,10	91,23
BELANJA TIDAK TERDUGA	15.860.656.883,00	9.258.465.946,00	58,37
BELANJA TRANSFER	366.570.663.360,00	349.420.243.455,00	95,32

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 251.290.435,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Laporan Akuntansi dan Pertanggungjawaban APBD

Outcomes : Persentase kelengkapan dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban APBD 100%

Realisasi : - Keuangan sebesar Rp 233.432.754,- (92,89%)
- Fisik 100%

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam rangka koordinasi Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran serta penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Bidang akuntansi dan pelaporan juga melaksanakan laporan-laporan pelaksanaan APBD ke Kementerian Keuangan sebagai salah satu syarat salur DAU antara lain :

- Laporan realisasi anggaran (LRA) bulanan,
- Data Transaksi Harian,
- Rekapitulasi Transaksi Harian,
- Posisi Kas Bulanan,
- Posisi Belanja;
- Laporan Operasional
- Laporan realisasi anggaran (LRA) per Triwulan dan Semester
- Laporan Penanganan Covid-19
- Laporan Dana Transfer Umum (DTU)
- Laporan Penanganan Inflasi

Dalam pelaporan tersebut, ketepatan waktu dan ketepatan pelaporan akan mempengaruhi penyaluran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat. Sehingga dalam pelaksanaan pelaporan tersebut dalam Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan tepat waktu.

Berkaitan dengan penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021 ditetapkan tepat waktu yaitu tanggal 22 juli tahun 2022 dari ketentuan paling lambat ditetapkan tanggal 30 agustus 2022.

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.393.568.382.720,- dengan capaian indikator sebagai berikut :

Output : Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Dokumen

Outcomes : Persentase penyaluran dana bantuan pemerintah daerah 100%

Realisasi : - Keuangan sebesar Rp 361.554.618.060,- (91,87%)
- Fisik 100%

Kegiatan penunjang kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari

pembayaran bunga pinjaman pada PT. SMI, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Pengelolaan Dana Bagi hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Desa serta Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Belanja Transfer yang bersifat umum yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta Belanja Transfer yang bersifat khusus.

5. Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.95.689.760,- dengan capaian indikator sebagai berikut :

Output : Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan

APBD

Outcomes : Database Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi : - Keuangan sebesar Rp 81.146.865,- (84,80%)
- Fisik 100%

Kegiatan ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi SIPD dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi mulai dari modul penganggaran, modul penatausahaan dan modul akuntansi dan pelaporan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran pertama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Komitmen pimpinan untuk penggunaan aplikasi SIPD Penatausahaan dan Aklap
2. Dukungan dari Pemerintah pusat berkaitan dengan fasilitasi dan asistensi serta dukungan dalam penggunaan SIPD Penatausahaan dan Aklap
3. Kapasitas SDM pengelola SIPD penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan yang cukup memadai.
4. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua bidang dalam mewujudkan tujuan organisasi.
5. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua Organisasi Perangkat Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah

6. Terbitnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

1. Aplikasi SIPD yang pada awal tahun 2022 belum siap secara kesisteman terkait dengan SIPD Penatausahaan dan SIPD Akuntansi dan Pelaporan;
2. Juknis dalam penyusunan APBD 2022 yang terlambat dan Juknis pengelolaan dana alokasi khusus yang sering terlambat;
3. Pemahaman Penggunaan Aplikasi SIPD Modul Penatausahaan dan Modul Akuntansi dan Pelaporan masih sangat kurang terutama bagi Bendahara Pengeluaran OPD;
4. Penyerapan anggaran diawal-awal tahun berjalan sedikit lebih lambat karena terkendala dengan penggunaan aplikasi SIPD;
5. Capaian Pendapatan Asli Daerah yang tidak sesuai dengan target juga mempengaruhi proses pencairan belanja;
6. SIPD Modul Akuntansi dan Pelaporan yang menu-menu pelaporannya belum siap, sehingga dilakukan back up laporan secara manual;
7. Dimensi Transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam IPKD masih sangat kurang hal ini disebabkan karena keterlambatan mengupload dokumen Perencanaan, dokumen keuangan, Rencana umum pengadaan dan dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan;
8. Dimensi kemampuan keuangan daerah juga mempengaruhi Indeks pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan PMK 193 Tahun 2022 rasio kapasitas fiskal Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam kategori sangat rendah

Solusi pemecahan masalah dalam pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah daerah antara lain :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara lebih intensif berkaitan dengan penggunaan SIPD Penatausahaan dan SIPD Akuntansi dan Pelaporan kepada Kemendagri khususnya Pusdatin dan pengembang SIPD;

2. Melakukan koordinasi dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus;
3. Melakukan pelatihan bagi Bendahara Pengeluaran OPD berkaitan dengan SIPD Penatausahaan, karena tidak tersedia anggaran, pelatihan dilakukan melalui zoom meeting;
4. Melakukan asistensi kepada Bendahara Pengeluaran OPD berkaitan dengan proses penatausahaan keuangan;
5. Melakukan koordinasi dengan semua stakeholder berkaitan dengan optimalisasi pencapaian target PAD;
6. Koordinasi dengan stakeholder berkaitan dengan transparansi dan keteraksesan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi;
7. Melakukan koordinasi dengan stakeholder berkaitan dengan penggalan potensi-potensi pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

b. SASARAN 2 : Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah

Pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah terdiri dari penatausahaan barang milik daerah, pengamanan barang milik daerah, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah.

Beberapa permasalahan yang sering muncul yang sering dihadapi oleh hampir semua daerah di antara lain yaitu: (1) Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset belum dioptimalkan (*underutilized*); (5) Standard operating prosedur (SOP) belum disusun; (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No 2 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi Th. sebelumnya	Target akhir renstra 2026	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah	%	77,65	79,24	102,05	-	85,03	

a) Indikator

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran Prosentase penanganan permasalahan aset daerah telah dipetakan beberapa permasalahan aset antara lain:

1. Aset berupa Tanah Pemerintah

- a. Tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat sebanyak 742 bidang dan telah disertifikatkan sebanyak 46 bidang di tahun 2022 sehingga total yang belum bersertifikat sebanyak 696 dari total 1.712 bidang Tanah pemerintah daerah yang bermasalah 7 bidang dari total 1.712 bidang.
- b. Tanah pemerintah daerah sebelumnya yang bernilai 0 (nol) sebanyak 129, Tahun 2022 tanah tersebut telah dilakukan appraisal dan telah diterbitkan nilai terhadap 129 bidang tanah tersebut dari total 1.712 bidang

Total aset berupa tanah pemerintah daerah yang masih bermasalah sejumlah 703 bidang dari 1.712 bidang atau sebesar 41,06%

2. Aset berupa Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya sejumlah 527 unit dari total 114.670 unit atau sebesar 0,46%

Rata-rata aset pemerintah daerah yang bermasalah sebesar 20,76% atau 79,24% telah tertangani.

Metode untuk menghitung pencapaian indikator yaitu :

$$\text{Persentase Pencapaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Target}} \times 100\%$$

$$95,34 : \frac{74,13}{77,65} \times 100\%$$

c). Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator prosentase penanganan permasalahan aset daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 adalah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah
4. Pengamanan Barang milik Daerah
5. Penilaian Barang Milik Daerah
6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik Daerah
8. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Penjabaran pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Standar Harga

Penyusunan standar harga sebagai salah bagian penting dalam penyusunan perencanaan penganggaran.

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp. 58.976.628,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen Standar Harga

Outcomes : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD
100%

Realisasi : - Keuangan sebesar Rp30.536.792,- (51%)
- Fisik 100 %

Standar Harga adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja. Tahun Anggaran 2022 BPKAD telah menyusun dokumen SSH untuk Tahun Anggaran 2023.

2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.9.885.378,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen RKBMD 1 Dokumen
Outcomes : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%
Realisasi : - Keuangan sebesar 9.552.056,- (96,63%)
- Fisik 100 %

3. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.60.204.500,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Pengkodefikasian BMD
Outcomes : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%
Realisasi : - Keuangan sebesar 44.600.021,- (74,08%)
- Fisik 100 %

4. Pengamanan Barang milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp225.587.812,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen Penyertifikatan aset daerah 66 Sertifikat
Pal tanah 200 buah
Papan tanah Pemda 30 buah

Outcomes : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD
100%

Realisasi : - Keuangan sebesar 151.350.932,- (67,09%)
- Fisik 100 %

5. Penilaian Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp176.544.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen Hasil Penilaian BMD

Outcomes : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD
100%

Realisasi : - Keuangan sebesar 161.536.000,- (91,50%)
- Fisik 100 %

6. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.47.656.000,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen hasil pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD

Outcomes : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD
100%

Realisasi : - Keuangan sebesar 32.486.257,- (68,17%)
- Fisik 100 %

7. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.16.918.250,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Dokumen SOP Pemindahtanganan 1 dokumen

Outcomes : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD
100%

Realisasi : - Keuangan sebesar Rp. 14.869.116,- (87,89%)
 - Fisik 100 %

8. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Untuk melaksanakan kegiatan ini disediakan anggaran sebesar Rp.106.757.237,- dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Output : Berita Acara rekonsiliasi barang milik daerah 1 laporan

Outcomes : Persentase kelengkapan dokumen penatausahaan BMD 100%

Realisasi : - Keuangan sebesar 78.204.737,- (73,25%)
 - Fisik 100 %

Adapun daftar realisasi penyertifikatan tanah pemerintah daerah tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

REALISASI TARGET PENYERTIFIKATAN
 TAHUN 2022

No.	Nama Obyek	Lokasi	Luas M2	Keterangan
1	Tanah Bangunan Pasar	Semparu, Kec. Kopang	3.344,00	sdh terbit
2	Tanah Pasar Darek	Desa darek kec. parabarda	3.350,00	sdh terbit
3	Pasar Karang Sidemen	Karang Sidemen BKU	1.000,00	sdh terbit
4	Pasar Mangkung	Mangkung, Kec. Praya Barat	3.621,00	sdh terbit
5	Tanah SDN Pidade	Pidade desa sintung kecpringgarata loteng	2.380,00	sdh terbit
6	RDK SDN 1 Sengkol	Dusun Sengkol Desa Sengkol Kec Pujut	467,00	sdh terbit
7	Pustu Kateng/PKM Mangkung	Kateng Prabar, Kec. Praya Barat	500,00	sdh terbit
8	RDG SMPN 3 Pujut	Dusun Teruwai Desa Teruwai	1.507,20	sdh terbit
9	Tanah SMPN 6 Pujut	Dusun Lendang lantan Desa Tumpak Kec. Pujut	13.000,00	sdh terbit
10	Tanah Bangunan Bangunan Pembibitan (BBI)	Desa Aik Bukak, Kec. Batukliang Aik Bukak	18.000,00	sdh terbit

No.	Nama Obyek	Lokasi	Luas M2	Keterangan
11	Rumah Dinas Kepala Pratim	Dusun Pengendong Ds. Mujur Kec. Praya Timur	1.000,00	sdh terbit
12	Pustu Tanak Beak	Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara	425,00	sdh terbit
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Barabali Dusun Kelanjoh Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah	1.300,00	sdh terbit
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Barabali Dusun Kelanjoh Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah	1.800,00	sdh terbit
15	Tanah Komplek RDG	Dusun Kerekok Ds. Pelambik Kec. Praya Barat Daya	435,00	sdh terbit
16	Tanah SDN Kabol Baru	Desa Kabol Kec Prabarda	2.000,00	sdh terbit
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Peresak Dusun Bujak Daye Desa Peresak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah	600,00	sdh terbit
18	Tanah Sisa	Gelondong Kel. Panjisari	3.139,00	sdh terbit
19	Tanah RD SDN 1 & 2 Pengadang	Dusun Pengadang Ds. Pengadang Kec. Praya Tengah	900,00	sdh terbit
20	SMPN 4 Praya Tengah	Desa Lajut Kec. Praya Tengah	10.000,00	sdh terbit
21	RD SDN bebuak	Dusun Lilin ds Bebuak	619,06	sdh terbit
22	Tanah RDK Bebuak	Bebuak, Kec. Kopang	585,36	sdh terbit
23	RDG SDN Kopang Rembige	Dusun Puyung Ds. Kopang Rembige	394,00	sdh terbit
24	SDN 1 DARMAJI	DESA DARMAJI	2.600,00	sdh terbit
25	SDN 1 PESENG	DESA WAJAGESENG	2.563,00	blm
26	Tanah RDK SDN 2 Medas	Dusun Medas Desa Bagu Kec. Pringgarata	250,00	sdh terbit
27	Rumah Dinas Guru SDN Aik Are	Jalan Raden Puguh aik are Kec. Jonggat	560,00	sdh terbit
28	Tanah Perumahan Guru Komplek Pasar Jelantik	Desa Jelantik Kec. Jonggat	900,00	sdh terbit
29	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Pringgarata-Barabali Desa Pringgarata Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah (PDAM)	600,00	sdh terbit
30	PKM Wajegeseng	Peseng Desa Wajegeseng Kec. Kopang	4.627,00	sdh terbit
31	Tanah Puskesmas Tanak Beak	Desa Tanak Beak Kec. Batukliang Utara	3.500,00	sdh terbit
32	Pustu Kabul	Desa Kabul Kec. Praya Barat Daya	500,00	sdh terbit

No.	Nama Obyek	Lokasi	Luas M2	Keterangan
33	Pustu selong blanak	Selong blanak Kec. Praya Barat	500,00	sdh terbit
34	PKM Langko	Selebung Rembiga Janapria	2.640,00	sdh terbit
35	Perumahan Guru Kekere (Bagian Selatan)	Kekere Kel. Semayan	2.002,00	sdh terbit
36	USB SD-SMP satu atap BKU	Desa Lantan BKU	4.000,00	sdh terbit
37	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II (RDG & RDK SDN Mesoran	Mesoran Ds. Aik Bukak Kec. BKU	400,00	sdh terbit
38	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan (Rumah Dinas Guru SDN Mas mas)	Mas - Mas	258,00	sdh terbit
39	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Desa Aik Bukak	2.700,00	sdh terbit
40	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	Gelogor Desa Mas-Mas Kec. Batukliang Utara	248,00	sdh terbit
41	Kantor Sat Pol PP	Jl. Bung Tomo No. 03 Desa Praya Kota. Kec. Praya Kab. Lombok Tengah (Tanah Kantor Sat. Polpp)	1.935,00	sdh terbit
42	Kebun Kelapa	Lendang Dongkes Kec. Preaya	80.000,00	sdh terbit
43	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Selter Wajegeseng)	Desa Wajegeseng Kec. Kopang	990,00	sdh terbit
44	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Raya Praya Desa Leneng Kec. Praya Kab. Lombok Tengah	1.200,00	sdh terbit
45	Tanah Pasar Pacor Dao	Desa Aik Darek Kec. Batulkilang	9.500	
46	Tanah Lantai Jemur Rumput Laut	Desa Kuta Kec Pujut	1.500	

Sedangkan aset/tanah pemerintah daerah yang semula sejumlah 129 bidang dengan nilai nol, telah dilakukan appraisal untuk penentuan nilai sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut :

DAFTAR ASET TANAH DAN BANGUNAN YANG TELAH DILAKUKAN PENILAIAN

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
-----	------------	--------	------------

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	PDAM Praya, Lingkungan Kauman, Kel Praya Kec Praya	Telah dinilai
2	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Poliklinik, Lingk. beremis Kelurahan Renteng	Telah dinilai
3	Tanah Untuk Bangunan Ibadah Lainnya	tempat ibadah, Jalan Jati Lingkungan perum tampar ampar Kelurahan Jontlak Kec. praya tengah	Telah dinilai
4	Tanah Sawah Irigasi	Tanah Kosong Lingkungan Loang Sawak, Kelurahan Jontlak Kec. Praya Tengah	Telah dinilai
5	Tanah Lapangan Lainnya	tempat bermain, Jalan Trembesi Lingkungan Perum Tampar ampar Kelurahan Jontlak Kec. praya tengah	Telah dinilai
6	Tanah Lapangan Lainnya	tempat bermain, Jalan Kenari Lingkungan Perumnas Tampar ampar Kelurahan Jontlak Kec. praya tengah	Telah dinilai
7	Tanah Lapangan Lainnya	tempat bermain, Jalan Mahoni Lingkungan Perumnas Tampar ampar Kelurahan Jontlak Kec. praya tengah	Telah dinilai
8	Tanah Lapangan Lainnya	tempat bermain, Jalan Johar perum Tampar ampar praya tengah	Telah dinilai
9	Tanah Lapangan Lainnya	tempat bermain, Jalan Kemuning II perumnas tampar ampar praya tengah	Telah dinilai
10	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	tempat pembuangan sampah, Jalan Kemuning II tampar ampar praya tengah	Telah dinilai
11	Tanah Lapangan Penimbunan Pembuangan Sampah	tempat pembuangan sampah, Jalan Jendral Sudirman Lingkungan tampar ampar Kelurahan Jontlak Kec. praya tengah	Telah dinilai
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	TANAH RUMAH DINAS BIDAN 1, desa sengkol kec. Pujut	Telah dinilai
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	TANAH RUMAH , desa sengkol kec. Pujut DINAS BIDAN 2	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
14	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Puskesmas Ganti, desa ganti kec. Praya timur	Telah dinilai
15	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	RUMAH DINAS DOKTER, DESA SENGKOL KECAMATAN PUJUT	Telah dinilai
16	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Puskesmas Wajageseng (Eks Perumahan Guru), dusun Peseng Desa Wajegeseng Kec. Kopang	Telah dinilai
17	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Polindes Bonder & Polindes Batujai	Telah dinilai
18	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Polindes Bonder & Polindes Batujai	Telah dinilai
19	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Pustu Jango dan Pustu Stuta	Telah dinilai
20	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Pustu Jango dan Pustu Stuta	Telah dinilai
21	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Pustu Lekor, Desa lekor kec. Janapria	Telah dinilai
22	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	PUSTU PENDEM, DESA PENDEM KEC. JANAPRIA	Telah dinilai
23	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Bangunan Polindes Semoyang, Polindes landah dan Pustu Bilelendo	Telah dinilai
24	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Bangunan Polindes Semoyang, Polindes landah dan Pustu Bilelendo	Telah dinilai
25	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Bangunan Polindes Semoyang, Polindes landah dan Pustu Bilelendo	Telah dinilai
26	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Bangnunan Pustu Landah	Telah dinilai
27	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Gedung Pustu Dasan Baru, dusun Semalang Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang	Telah dinilai
28	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	Bangunan Poskesdes Beleke, Desa Beleke, Kec. Praya Timur	Telah dinilai
29	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Jalan Selatan : Tanah Haji As'ari Timur : Tanah Haji As'ari Barat : Jalan Terdiri dari 1 unit bangunan, dusun tanak beak desa tanak beak.	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
30	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Komplek RDG Kerembong, dusun kerembong desa kerembong.	Telah dinilai
31	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	-Tanah kosong diatas bukit-Bangunan RD sudah robohUtara : Aq. SetiaSelatan : SDN TundungTimur : Aq. Din/Papuk YokBarat : Aq. Setia, dusun kebon randu, desa mantang kec. Batukliang.	Telah dinilai
32	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Aq. Yunus Selatan : Jalan Timur : H. Amin Barat : Sekolah Tanahnya tidak terpisah dari sekolah secara persil tapi sebagian, terdiri dari 6 unit bangunan, dusun bon rijing Bonjeruk, Kec. Jonggat.	Telah dinilai
33	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Selatan : Tower/H. Mesrun Timur : Jalan Raya Barat : Aq. Rapi'ah Utara : R. Suparlan Terdiri dari 3 unit bangunan, dusun bual desa darek.	Telah dinilai
34	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kekere Kel. Semayan	Telah dinilai
35	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : L. Sukarme Selatan : Jalan Raya Barat : R.L. Suparman Timur : Sawah Suhaili Terdiri dari 2 unit bangunan,Dusun beraim desa beraim Kec. Praya Tengah.	Telah dinilai
36	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Timur : Sawah Utara : Aq. Ukim Barat : Sekolah SDN 2 Selebung Selatan : Jalan Terdiri dari 13 unit bangunan, dusun selebung desa selebung janapria.	Telah dinilai
37	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Selatan : Gang Utara : Gang/Poskesdes Barat : Jalan Raya Timur : Mq. Toni, dusun ketare desa ketare pujut	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
38	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Selatan : H.L. Misbah Timur : Aq. Suef Barat : Aq. Lamun Utara : Aq. Marwaj Terdiri dari 6 unit bangunan (Dibangun kurang lebih pada tahun 1970-an. Dibeli dari Aq. Satiah dan Aq. Jenah) dusun lilin desa bebuak kopang.	Telah dinilai
39	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Rumah Bpk. Faisal Husen Selatan : Puskesmas Timur : Sawah Inaq Siti Barat : Jalan Raya Praya Kopang dusun pengadang desa pengadang praya tengah	Telah dinilai
40	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : H. Mujtihad Selatan : Sawah Barat : Jalan Timur : Kali Terdiri dari 4 unit bangunan, dusun dasan jontlak desa darek praya barat daya.	Telah dinilai
41	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	RD SDN Bebuak, dusun lilin desa bebuak, Terdiri dari 3 unit bangunan.	Telah dinilai
42	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Persawahan Selatan : Jalan Raya Timur : Rumah Penduduk Barat : Rumah Penduduk Terdiri dari 5 unit bangunan, RDG SMPN 3 Pujut, dusun teruwai desa teruwai.	Telah dinilai
43	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Tanah Amak Surak Selatan : Tanah Amak Antap Timur : Jalan Raya Barat : Tanah Amak Sri Terdiri dari 3 unit bangunan, Tanah RD Komplek Pasar Sukarare	Telah dinilai
44	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Barat : Jalan Selatan : Aq. Jogo Timur : Kuburan + Amber Nur Game Utara : L. Muhrim Terdiri dari 5 unit bangunan, Komplek RD Guru Sengkol,	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
		dusun sedo desa sengkol.	
45	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Selatan : Sekolah SDN Selangit Timur : Jalan Raya Barat : Abdul Majid Utara : Suminggep Terdiri dari 2 bangunan, dusun selangit desa pelambik.	Telah dinilai
46	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Barat : Faturrahman & Sawah Selatan : Jalan Utara : Purnama, Mastin, Wawan Timur : R. Salehan Terdiri dari 10 unit bangunan, dusun kesambik mate desa sengerang praya timur.	Telah dinilai
47	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Rumah Penduduk Selatan : Jalan Raya Barat : Rumah Penduduk Timur : Rumah Penduduk dusun aik are desa ubung kec. Jonggat	Telah dinilai
48	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Tuan Seilip Timur : Aq. Mo'im Selatan : Aq. Irik / Ks. Barokah Barat : Jalan Terdiri dari 3 unit bangunan, dusun sedo desa sengkol.	Telah dinilai
49	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Selatan : Masrun Utara : Jalan Barat : Aq. Gazali, Aq. Sadli, Aq. Mala Timur : Masrun Terdiri dari 3 unit bangunan, dusun pengembur desa pengembur.	Telah dinilai
50	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Iq. Hilna Selatan : Aq. Sahil Timur : Jalan Raya Barat : Aq. Bandi desa darek kec. Praya barat daya	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
51	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Terdiri dari 2 Unit RDG SDN Rajan, dusun rajan desa pengembur kec. Pujut.	Telah dinilai
52	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Wakaf dari Bpk. Jumenah Lokasi sekarang merupakan tanah kosong karena SDN Sinurus pindah ke Karang Sidemen. Utara : Jalan Desa Selatan : Rumah Bpk. Jumenah Timur : Jalan Desa Barat : Gang dusun sinurus desa mas-mas kec. Batukliang utara	Telah dinilai
53	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Tanah PT. Angkasa Pura I Selatan : Jalan Raya Timur : Tanah Warga Barat : Rumah Penduduk 6 Unit Rumah Dinas Guru Komplek (Batako), dusun rebile desa tanak awu pujut	Telah dinilai
54	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Perumahan Guru SDN Sereneng, dusun sereneng desa mertak pujut	Telah dinilai
55	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Embung Selatan : Gang Barat : Pustu Timur : Rumah Penjaga embung dan embung Terdiri dari 9 unit bangunan, dusun pengadangan desa semoyang.	Telah dinilai
56	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Sungai Selatan : Jalan Timur : Mu'in Barat : Cek Nur Leneng, Kec. Praya	Telah dinilai
57	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Tanah H. Husni Parhan Selatan : Kali Timur : Jalan Barat : Tanah H. Husni Parhan (Pembelian dari H. Husni Parhan (Mantan Kades Tanak Beak) Terdiri dari 2 unit bangunan, dusun tanak bengan desa tanak beak.	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
58	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	4 unit RDG, dusun tanak awu desa tanak awu pujut	Telah dinilai
59	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Jalan Raya Aik Bukak Timur : Gang/Masjid Selatan : Tanah Kosong/Kandang Ayam Barat : Rumah Penduduk & Pasar Terdiri dari 3 unit bangunan, dusun aik bukak desa aik bukak.	Telah dinilai
60	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Terdiri dari 3 Unit RDK Utara : Jalan Raya Selatan : Perumahan Penduduk/Polindes Timur : Jalan/Gang Barat : Aq. Udin dusun guci desa truwai pujut	Telah dinilai
61	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Desa jelojok kec. Kopang	Telah dinilai
62	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Tanah Bpk. Jumali Selatan : Jalan Raya Timur : Sahlan Barat : H.Syukri dusun medas desa bagu pringgarata	Telah dinilai
63	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : H.L. Maknan Yasin Selatan : Pondasi Aq. Suhirman Timur : L. Astam Barat : H. Marham/Kebun Bebuak kec. Kopang	Telah dinilai
64	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Baiq Nawasih Selatan : Jalan Kampung Timur : Jalan Sukarara-Puyung Barat : Jalan Kampung dan Rumah Bapak Hakim desa puyung, kec. Jonggat	Telah dinilai
65	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Jalan Raya Selatan : Kali Timur : Iq. Endang Barat : Kebun/Tanah Kosong Dusun bile bongkok desa kabol kec. Praya barat daya	Telah dinilai
66	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Tanah Mq. Sahwi Selatan : Jalan Timur : Tanah H. Muhdin Barat : Tanah Mq. Marwi dusun krekok desa pelambik	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
		kec. Praya barat daya	
67	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Aq. Hajar Selatan : SDN Persil Timur : Aq. Selamat Barat : Jalan Desadusun persil desa karang sidemen kec. BKU	Telah dinilai
68	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Tanah Masyarakat Selatan : Tanah Papuk Petemon Timur : Tanah Masyarakat Barat : Jalan Raya Dusun tunak malang, desa unggga praya barat daya	Telah dinilai
69	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Rumah Dinas Guru, beleka kec. Praya timur	Telah dinilai
70	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Tanah H. Ridwan/Aq. Merti Selatan : Jalan Timur : Tanah H.L. Taman Barat : Tanah Pos Polisi Desa batujangkih, praya barat daya	Telah dinilai
71	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Kebun Timur : Kebun Selatan : Jalan Barat : Kebun Terdiri dari 3 unit bangunan (RDG SDN Ketangge, RDG SDN Teratak & RDG SDN Selewat) dusun montong dau desa teratak, BKU	Telah dinilai
72	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Jalan Selatan : Tanah L. Burhan Timur : Jalan/Gang Barat : SDN 1 Selebung Terdiri dari 3 unit bangunan, dusun selebung desa selebung kec. batukliang.	Telah dinilai
73	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Barat : Pak Suhardi Timur : Gang Utara : Aq. Madun Selatan : Jalan Terdiri dari 4 unit bangunan, dusun montong belok kec. batukliang.	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
74	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Barat : Aq. Angap Timur : Jalan Utara : Jalan Selatan : Rumah Penduduk Terdiri dari 2 unit bangunan (ditempati Kepsek SDN Gunung Amuk) dusun montong belok kec. batukliang..	Telah dinilai
75	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Saluran Selatan : Tanah Haji Lalu Mahsun Timur : Tanah Haji Lalu Mahsun Barat : Saluran Terdiri dari 1 unit bangunan, dusun lendang doda desa barebali, kec. batukliang.	Telah dinilai
76	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Pembelian dari Aq. Ismail Utara : Sudarman Selatan : H.Lalu Aruman Timur : H. Mursal Barat : Jalan Raya dusun kemiri desa loang make kec. Janapria	Telah dinilai
77	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Baiq Yasmin Selatan : Jalan Desa Timur : Aq. Itril/Aq. Yusuf Barat : Jalan Raya dusun langko desa langko kec. Janapria	Telah dinilai
78	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Rumah Penduduk Selatan : Rumah Penduduk Timur : SDN Mesoran Barat : Masjid dusun mesoaran desa aik bukak kec.BKU	Telah dinilai
79	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	di Pakai TK, dusun tanak awu desa tanak awu pujut	Telah dinilai
80	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Jalan Raya Selatan : Tanah Haji Alfani Timur : Tanah Haji Alfani Barat : SDN 1 Mangkung desa mangkung kec. Praya barat	Telah dinilai
81	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Pembelian dari Aq. Sari'ah Utara : Tanah Iq. Suryani Selatan : Sekolah Dasar Timur : Tanah Azhari Barat : Saluran desa lendang are kec. Kopang	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
82	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Rumah Tauhid Selatan : Tanah Sahran Timur : Jalan Barat : Tanah Maliki Terdiri dari 1 unit bangunan, dusun petikus desa aik bukak kec. bku.	Telah dinilai
83	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Pembelian dari Aq. Sukiati Utara : Tanah Pathurrahman Selatan : Tanah Her Timur : Jalan Barat : Tanah Award dusun puyung desa kopang rembiga kec. Kopang	Telah dinilai
84	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Saluran Selatan : Jalan Raya Timur : Saluran Barat : SDN 3 Mantang Terdiri dari 1 unit bangunan (Staf UPT Dikdas Batukliang) dusun mantang desa mantang kec. Batukliang	Telah dinilai
85	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Gang Selatan : H. Umrah Timur : Sawah dan Rumah H. Junaidi Barat : Jalan Raya 5 Unit RDK, dusun bile montong I desa kawo pujut	Telah dinilai
86	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Aq. Sabri Selatan : Jalan Desa Timur : Aq. Prian Barat : SDN Lekong Madi dusun gobok repuk desa bujak kec. Batukliang	Telah dinilai
87	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Rumah Badrun Selatan : Jalan Raya Timur : Jalan Raya Barat : Tanah H. Haluwat dusun truwai desa truwai pujut	Telah dinilai
88	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1 Unit RDK, dusun sengkol desa sengkol pujut	Telah dinilai
89	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Pembelian dari Amaq Ijan Utera : Jalan Raya Selatan : Perumahan Warga Timur : Perumahan Warga/Dugel Supriadi Barat : Perumahan Warga/Aq. Serah dusun pengendong desa mujur kec. Praya timur	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
90	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Polindes Selatan : Lapangan Volly Timur : Gang / Trotoar Barat : Rumah Penduduk Terdiri dari 3 unit bangunan, dusun sintung desa bagu kec. pringgarata.	Telah dinilai
91	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Rumah Penduduk Barat : Jalan Raya Timur : H.L. Madhan Selatan : Perumahan Penduduk Terdiri dari 10 unit bangunan, depan pasar barebali desa barebali kec. batukliang.	Telah dinilai
92	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Tanah Bpk. Rusne Selatan : Tanah Aq. Heni Timur : Perumahan Penduduk Barat : Gang desa jelantik kec. Jonggat	Telah dinilai
93	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	DST (Utara : Tanah H. Muhlis Selatan : Gang/Jalan Timur : Tanah Usman Barat : Selokan) Terdiri dari 2 unit bangunan, jalan raden puguh aik are kec. Jonggat.	Telah dinilai
94	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Selatan : H. Solihin Utara : H. Ruslan Abdul Gani Timur : M. Subki Barat : Jalan Raya Terdiri dari 3 unit bangunan, dusun pegenjek desa pegenjek kec. jonggat.	Telah dinilai
95	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah RDG, dusun lekor desa lekor kec. Janapria	Telah dinilai
96	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Tanah Komplek, dusun lekor desa lekor kec. Janapria RDG Desa Lekor	Telah dinilai
97	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Jalan Raya Selatan : Rumah Fajar Timur : SDN Serewa Barat : Jalan Desa Dusun serewa desa pejanggik kec. Praya tengah	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
98	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Utara : Sawah Aq Maini Selatan : Tanah Aq. jartini Timur : Tanah Mq Suhaini Barat : Tanah Aq. Masni (Tanah tersebut merupakan tanah penukaran dari RD yang berlokasi di depan sdn2 semoyang oleh Kepala SDN Sosak waktu itu yang bernama Haji Setia tahun, dusun sosak desa semoyang kec. praya timur	Telah dinilai
99	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	Utara : Jalan Desa Selatan : Aq. Sudirman Timur : Mahnan Barat : Gang dusun lendang tampel daye desa beber kec. Batukliang	Telah dinilai
100	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	desa pejanggik kec. Praya tengah	Telah dinilai
101	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	dusun sekembang desa mertak kec. Pujut	Telah dinilai
102	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Eks. Pasar Batujai / desa batujai kec. Praya barat	Telah dinilai
103	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	SDN 22 Praya, Jln. Seroja No. 1 Praya Kel. Prapen	Telah dinilai
104	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	dusun ketangga desa batujai kec. Praya barat	Telah dinilai
105	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Desa Pagutan Kecamatan BatukLiang	Telah dinilai
106	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Lajut Kec. Praya Tengah	Telah dinilai
107	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kantor BPP Kawo, Desa kawo kec. Pujut	Telah dinilai
108	Tanah Kebun Percobaan	Kebun Percobaan, desa jelantik kec. Jonggat	Telah dinilai
109	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Semparu	Telah dinilai
110	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Batujangkih	Telah dinilai
111	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Sengkol	Telah dinilai
112	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Bunkate	Telah dinilai
113	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Beson	Telah dinilai
114	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Bonder	Telah dinilai
115	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Kawo	Telah dinilai
116	Tanah Bangunan Pasar	Eks. Pasar Kute	Telah dinilai
117	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Beleka	Telah dinilai
118	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Pengembur	Telah dinilai

No.	Jenis Aset	Lokasi	Keterangan
119	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Selong Belanak	Telah dinilai
120	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Mangkung	Telah dinilai
121	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Tanak Awu	Telah dinilai
122	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Labulia	Telah dinilai
123	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Langko	Telah dinilai
124	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Pemepek	Telah dinilai
125	Tanah Bangunan Pasar	Pasar pengadang	Telah dinilai
126	Tanah Bangunan Pasar	Pasar bodak montong terep	Telah dinilai
127	Tanah Bangunan Pasar	pasar darek	Telah dinilai
128	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Lendang Are	Telah dinilai
129	Tanah Bangunan Pasar	Pasar Jelantik	Telah dinilai

d). Dasar Hukum dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

e) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kedua yaitu prosentase penanganan permasalahan aset :

1. Adanya regulasi pengelolaan BMD.
2. Adanya aplikasi SIMDA BMD.
3. SDM yang mengelola aset memiliki kapasitas yang memadai.
4. Penanganan dan penyelesaian aset tanah yang bermasalah baik secara persuasif maupun melalui tingkat pengadilan.
5. Koordinasi dengan stakeholder yang baik.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran prosentase penanganan permasalahan aset antara lain :

1. Tidak terkoneksi SIMDA BMD dengan SIPD;
2. Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat;
3. Dalam proses pensertifikatan tanah milik daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan MoU dengan BPN;

4. Proses penerbitan sertifikat yang cukup lama;
5. Proses penatausahaan barang milik daerah di masing-masing OPD belum tertib;
6. Belum terbentuknya tim pengawasan aset;
7. Penghapusan barang milik daerah terkendala tim appraisal;
8. Pemanfaatan aset pemerintah daerah harus dilakukan appraisal sebelumnya.

Solusi pemecahan masalah dalam pencapaian Prosentase Penanganan masalah aset daerah antara lain :

1. Melakukan Koordinasi dengan stakeholder dengan membentuk tim pengawasan barang milik daerah;
2. Melakukan Koordinasi dengan OPD untuk lebih tertib dalam proses penatausahaan barang milik daerah
3. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola barang OPD

III. 3 Evaluasi Pencapaian Kinerja pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2022

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang diraih Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah **Kab. Lombok Tengah Tahun 2022**

TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN			KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA
	1	2	3				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	60,21	86,01	Baik	94,03	Baik	
	2	79,24	102,05	Baik			

TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAIAN TUJUAN	RATA-RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUMNYA
Rata-rata Total	94,03%		Baik	94,03%	Baik	

Penjelasan Evaluasi pencapaian kinerja pencapaian tujuan strategis, capaian indikator tujuan, dan indikator program pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022 merupakan rata-rata dari capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :

- A. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian 60,21 point dari target 70,00 point atau sebesar 86,01%
- B. Prosentase Penanganan permasalahan Aset Daerah dengan capaian 79,24% dari target 77,65% atau sebesar 102,05%

Dari capaian tersebut rata-rata capaian tujuan : $(86,01\% + 102,05\%)/2 = 94,03\%$ atau kategori baik.

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat diketahui dari aspek anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	35.600.524.035	34.211.602.001	96,10
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	396.329.467.735	364.192.602.722	91,89
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	702.529.805	523.135.911	74,46
Jumlah		432.632.521.575	398.927.340.634	92,21

Penyerapan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah 2022 sebesar 92.21%, yang menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah sangat baik atau lebih dari 91%.

Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi			Sisa Dana
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK	
	BPKAD	432.632.521.575	398.927.340.634	92,21%	97,61%	33.705.180.941
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.600.524.035	34.211.602.001	96,10%	92,82%	1.388.922.034
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.395.327	31.519.427	94,38%	100,00%	1.875.900
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.292.013	19.292.013	95,07%	100,00%	1.000.000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.103.314	12.227.414	93,32%	100,00%	875.900
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.478.862.729	33.321.348.136	96,64%	100,00%	1.157.514.593
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.456.641.046	33.303.108.297	96,65%	100,00%	1.153.532.749
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.164.270	6.958.078	97,12%	100,00%	206.192
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.545.752	0	0,00%	100,00%	2.545.752
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.220.793	10.020.793	98,04%	100,00%	200.000
	5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.290.868	1.260.968	55,04%	100,00%	1.029.900
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.268.370	74.250.000	73,32%	100,00%	27.018.370
	1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.494.370	55.600.000	98,42%	100,00%	894.370
	2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.774.000	18.650.000	41,65%	100,00%	26.124.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	614.882.323	442.464.132	71,96%	66,03%	172.418.191
	1 Pengadaan Mebel	245.553.767	100.000.000	40,72%	16,67%	145.553.767
	2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.778.556	98.264.132	81,36%	81,42%	22.514.424
	3 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	248.550.000	244.200.000	98,25%	100,00%	4.350.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.788.286	242.664.306	92,34%	100,00%	20.123.980
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.700.000	48.431.670	72,61%	100,00%	18.268.330

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi			Sisa Dana	
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK		
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.088.286	194.232.636	99,05%	100,00%	1.855.650
		Belanja Operasi	196.088.286	194.232.636	99,05%	99,05%	1.855.650
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.327.000	99.356.000	90,88%	90,88%	9.971.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.327.000	99.356.000	90,88%	100,00%	9.971.000
	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	396.329.467.735	364.192.602.722	91,89%	100,00%	234.476.891.013
	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.145.741.368	1.079.552.889	94,22%	100,00%	66.188.479
	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	727.935.375	710.295.663	97,58%	100,00%	17.639.712
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	65.786.875	61.053.500	92,80%	100,00%	4.733.375
	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	47.964.265	47.964.265	100,00%	100,00%	0
	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	49.164.265	46.964.265	95,53%	100,00%	2.200.000
	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	33.074.897	29.064.897	87,88%	100,00%	4.010.000
	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	28.239.897	26.919.897	95,33%	100,00%	1.320.000
		Belanja Operasi	28.239.897	26.919.897	95,33%	95,33%	1.320.000
	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	60.057.652	49.042.752	81,66%	100,00%	11.014.900
	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	52.171.952	48.761.597	93,46%	100,00%	3.410.355
	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	44.665.070	37.343.948	83,61%	100,00%	7.321.122
	#	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	18.340.560	4.229.960	23,06%	100,00%	14.110.600
	#	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	18.340.560	17.912.145	97,66%	100,00%	428.415
	2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.268.363.452	1.243.852.154	98,07%	100,00%	24.511.298
	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1.069.148.089	1.069.061.329	99,99%	100,00%	86.760
	2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4.467.390	4.460.900	99,85%	100,00%	6.490
	3	Penatausahaan Pembiayaan	33.766.982	33.559.500	99,39%	100,00%	207.482

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi			Sisa Dana
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK	
	Daerah					
	4 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	84.170.056	77.290.940	91,83%	100,00%	6.879.116
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	11.207.110	11.192.000	99,87%	100,00%	15.110
	6 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	65.603.825	48.287.485	73,60%	100,00%	17.316.340
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	251.290.435	233.432.754	92,89%	100,00%	17857681
	1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	14.607.664	10.792.664	73,88%	100,00%	3.815.000
	2 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	50.562.851	45.552.851	90,09%	100,00%	5.010.000
	3 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	53.087.559	51.595.559	97,19%	100,00%	1.492.000
	4 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	128.172.504	120.631.823	94,12%	100,00%	7.540.681
	5 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.859.857	4.859.857	100,00%	100,00%	0
	Belanja Operasi	4.859.857	4.859.857	100,00%	100,00%	0
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	393.568.382.720	361.554.618.060	91,87%	100,00%	234.353.790.660
	1 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	11.137.062.477	4.257.772.897	38,23%	100,00%	6.879.289.580
	2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.860.656.883	8.283.808.128	52,23%	100,00%	7.576.848.755

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi			Sisa Dana
			KEUANGAN	KEU (%)	FISIK	
	Belanja Tak Terduga	15.860.656.883	8.283.808.128	52,23%	52,23%	7.576.848.755
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	22.451.364.168	5.710.867.350	25,44%	100,00%	16.740.496.818
4	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	344.119.299.192	343.302.169.685	99,76%	100,00%	203.157.155.507
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	95.689.760	81.146.865	84,80%	100,00%	14.542.895
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	95.689.760	81.146.865	84,80%	100,00%	14.542.895
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	702.529.805	523.135.911	74,46%	100,00%	179.393.894
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	702.529.805	523.135.911	74,46%	100,00%	179.393.894
1	Penyusunan Standar Harga	58.976.628	30.536.792	51,78%	100,00%	28.439.836
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	9.885.378	9.552.056	96,63%	100,00%	333.322
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	60.204.500	44.600.021	74,08%	100,00%	15.604.479
4	Pengamanan Barang Milik Daerah	225.587.812	151.350.932	67,09%	100,00%	74.236.880
5	Penilaian Barang Milik Daerah	176.544.000	161.536.000	91,50%	100,00%	15.008.000
6	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	47.656.000	32.486.257	68,17%	100,00%	15.169.743
7	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	16.918.250	14.869.116	87,89%	87,89%	2.049.134
8	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	106.757.237	78.204.737	73,25%	100,00%	28.552.500

Keseimbangan tingkat kinerja dengan keuangan, berpengaruh terhadap pencapaian kinerja suatu organisasi perangkat daerah. Berikut perbandingan antara realisasi anggaran dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

Tabel Perbandingan realisasi Anggaran dan Realisasi kinerja Tahun 2022

Kinerja						Keuangan			
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Point	70,00	60,21	86,01	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	396.329.467.735	364.192.602.722	91,89

2	Prosentase Penanganan Masalah Aset Daerah	Prosentase	77,65	79,24	102,05	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	702.529.805	523.135.911	74,46
RATA-RATA					94,03				92,21

Berdasarkan data dalam tabel diatas secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama Tahun 2022 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

III. 5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

a. Analisis efisiensi SDM dan Aset

Pencapaian sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Adapun efisiensi sumber daya aparatur sebagai berikut:

Tabel Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Berdasarkan Dokumen Evaluasi Jabatan

No	Nama Unit Kerja	Bezzeting	Kebutuhan	Keterangan
1.	Kepala Badan	1	1	
2.	Sekretariat	10	10	-
3.	Bidang Anggaran	8	10	Kurang pada jabatan verifikator anggaran
4.	Bidang Perbendaharaan			-
5.	Bidang Akuntansi dan Pelaporan			-
6.	Bidang Aset			-

Pada tahun 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengalami kekurangan pegawai pada bidang anggaran khusus verifikator anggaran.

Selain aspek sumber daya manusia , pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah dipengaruhi oleh oleh kondisi aset yang dimiliki. Adapun data aset yang dimiliki, Jumlah aset dalam kondisi baik dan data aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 dirinci sebagaimana terlampir.

a. Analisis Efisiensi Anggaran

pengertian efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/ sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan maka prosesnya dapat dikatakan semakin efisien. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika ada perbaikan pada prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah.

Dalam melakukan efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022 telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Terdapat penghematan pada pagu anggaran kegiatan dengan tidak mengurangi output/ capaian kinerja yaitu semua sub kegiatan Tahun 2022 namun tidak mengurangi capaian kinerja.
- 2) Kegiatan pelatihan bendahara pengeluaran yang anggarannya tidak tersedia dilakukan melalui metode zoom meeting dan asistensi.
- 3) Kelancaran Penggunaan Aplikasi SIPD Modul Penatausahaan dan Modul Aklap dikarenakan adanya koordinasi yang sangat intens dengan Tim Pengembang SIPD dan Kementrian Dalam Negeri
- 4) Terdapat penghematan anggaran perjalanan dinas karena kegiatan-kegiatan berupa rapat koordinasi dan bimbingan teknis oleh pemerintah pusat lebih banyak dilakukan melalui zoom meeting.

BAB IV

PENUTUP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022 telah melaksanakan seluruh program yang telah ditetapkan. Program yang diimplementasikan melalui kegiatan yang diprioritaskan sesuai visi misi yang telah diamanatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja serta keuangan yang menyertainya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022, dengan tujuan menyampaikan tingkat kualitas dan capaian kinerja SKPD.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022, BPKAD memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022 sasaran kumulatif adalah sebesar 94,03%. Apabila dilihat dari persentase capaian kinerja kumulatif ini, maka kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2022 dapat dikategorikan tercapai dengan baik dan berkualitas.

Akhirnya kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada segenap ASN lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung penyelenggaraan Tupoksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan baik.

Praya, 31 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAIQ ALUH WINDAYU W. SE MM
NIP. 197307291997032008

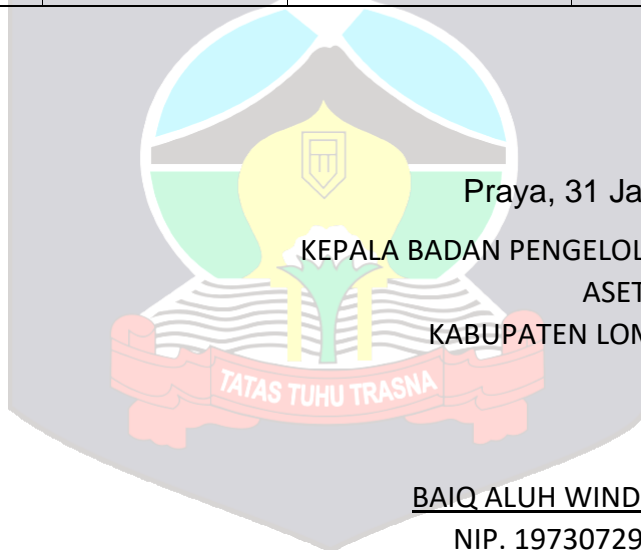
LAMPIRAN

1. DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENCAPAIAN SASARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA;
2. DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH SKPD TAHUN 2022
3. TABEL HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN;



**RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian (2022)	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70,00	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah	77,65	



Praya, 31 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAIQ ALUH WINDAYU W. SE MM
NIP. 197307291997032008

DAFTAR PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2022

HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD TAHUN 2022

NO.	SASARAN RPJMD	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2022	SASARAN RENSTRA SKPD	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD	PERJANJIAN KINERJA (PK) SKPD TAHUN 2022	PROGRAM/KEGIATAN SKPD TAHUN 2022	ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2021
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	396.329.467.735
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.600.524.035
			Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Prosentase Penanganan Permasalahan Aset Daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	702.529.805

Praya, 31 Januari 2022
Kepala BPKAD
Kabupaten Lombok Tengah

Baiq Aluh Windayu W., SE. MM
NIP. 197307291997032008